

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi ekonomi China diawali oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 diimplementasikan melalui program yang di sebut ‘Reformasi dan Keterbukaan’ (*Gaige Kaifang*). Reformasi perekonomian China telah mengarahkan pada sebuah sistem perekonomian baru ala China yaitu sistem pasar-sosialis (Kompas, Cermin dari Cina Geliat Sang Naga di Era Globalisasi, 2006). Sejak tahun 1979 reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping berupa perjuangan kelas berganti dengan melakukan modernisasi masyarakat sosialis.

Permulaan liberalisasi ekonomi bukan terjadi dari area perkotaan, tetapi justru dipedesaan. Para petani masih bertanggung jawab atas tanah negara, namun Deng mendorong petani untuk lebih fleksibel dalam memilih komoditas pertanian, lebih menyesuaikan dengan kondisi alam, dan tidak lagi dipersulit oleh urusan birokratis yang sangat terpusat seperti pada era Mao (Hasan, 2018). Berangkat dari liberalisasi ekonomi yang mulai diterapkan oleh Deng, saat ini Xi Jinping mencoba meneruskan sistem tersebut.

Xi Jinping memanfaatkan faktor-faktor yang ada dalam era kepemimpinannya untuk mendorong ekonomi China kearah yang lebih berkelanjutan, salah satunya dengan memanfaatkan globalisasi. Globalisasi menuntut China untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain guna mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain globalisasi yang menuntut China untuk melakukan kerjasama, faktor lain menurut Beige Book (Kevin, 2019), merujuk pada perekonomian China di

kuartal III-2019 berada di posisi terlemah selama tahun 2019. Lemahnya pertumbuhan ekonomi China disebabkan oleh aktivitas di sektor manufaktur yang kurang aktif serta memaparkan bahwa penjualan dari perusahaan-perusahaan sektor manufaktur, laba bersih, volume penjualan, dan harga jual yang jatuh hingga dua digit jika dibandingkan dengan kuartal II-2019.

China dikenal dengan tenaga kerja yang melimpah, maka dari itu ketika China menerapkan kebijakan satu anak dan memperlambat pertumbuhan penduduk serta populasi yang mulai menua tentu akan menjadi permasalahan bagi China terutama ketika kesenjangan sosial meningkat. Kurangnya tenaga kerja merupakan dampak dari kebijakan tersebut karena China membutuhkan tenaga kerja dari luar, hal ini dapat menjadi catatan bagi pemerintah China ditengah keinginannya untuk meningkatkan perekonomian.

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi China untuk segera mencari solusi demi meningkatkan perekonomian. Xi Jinping mencoba melakukan strategi-strategi untuk perluasan pangsa pasar melalui berbagai program pembangunan inklusif. Contohnya pembangunan inklusif *Belt and Road Initiative* (BRI) yang merupakan rencana besar pemerintah China untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutra atau *Silk Road* di abad ke 21 (Claudio, 2016).

Pada penelitian Passalacqua Claudio Christopher menilai bahwa China akan membangun kembali perekonomiannya melalui BRI yang dibentuk dari inovasi dibidang percepatan teknologi informasi dan telekomunikasi yang tengah dikembangkan oleh China (Claudio, 2016). BRI mengacu pada jalur darat berupa jalan dan rel kereta yang disebut sebagai Sabuk Ekonomi Jalur Sutra, serta jalur laut atau Jalur Sutra Maritim.

Selain pembangunan ekonomi bersifat inklusif, China juga melakukan strategi ekonomi yang bersifat massif seperti mengembangkan jaringan 5G (M HUDA PRAKOSO, 2016). Berdasarkan laporan Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi China, teknologi 5G diperkirakan berkontribusi sebesar 10,6 triliun yuan (US\$ 1,54 triliun) pada pertumbuhan ekonomi China. Selain itu, teknologi ini diprediksi akan menciptakan lebih dari tiga juta lapangan pekerjaan pada tahun 2020-2025 (Franedya, Resmi! China Masuki Era Teknologi 5G Komersial, 2019). Meskipun demikian, hingga kini kecanggihan 5G belum menyentuh negara India karena India masih menolak uji coba 5G yang diusulkan China.

China berusaha untuk melakukan uji coba jaringan 5G di India yang dikenal dengan negara yang berjumlah penduduk 1.080.264.388 dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 8,0% sejak tahun 2002 (Prasetyo E. , 2017), yang hingga saat ini masih menolak uji coba 5G karena mengkhawatirkan potensi pangsa pasarnya teralihkan oleh China. Selain itu, negara aliansi India, yakni Amerika Serikat memberi peringatan kepada India agar waspada dengan jaringan 5G yang dinilai dapat menembus keamanan suatu negara.

India pernah mengalami kesulitan neraca pembayaran pada tahun 1991, hal itu mengharuskan India melakukan reformasi kebijakan ekonomi demi membangkitkan kembali perekonomian melalui ekonomi terbuka. Hal tersebut ternyata cukup memberikan pengaruh positif bagi perekonomian India yang terlihat dari peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, aliran modal asing baik dalam bentuk *Portofolio Investment* maupun *Foreign Direct Investment* (Kompas, 17 November 2009).

Salah satu dampak dari reformasi ekonomi yang dilakukan India saat ini terletak pada kemajuan IT (*Information Technology*) India menjadi cukup fenomenal. Hampir semua industri IT raksasa membuka cabang kantor di kota Bangalore seperti *Microsoft*, *IBM*, *Infosys* dan *Wipro*. Semua didukung oleh kualitas pendidikan teknologi informasi yang memiliki reputasi internasional. Salah satu hal krusial yang menjadikan India bangkit adalah besarnya perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan.

Berangkat dari sistem pendidikan yang baik, India mencoba melakukan inovasi dibidang teknologi informasi. Pada tahun 1990an dari 150.000 pekerja asing yang bekerja di perusahaan IT Amerika Serikat, sebanyak 60.000 diantaranya adalah para pakar *software* dari India (Ibrahim, *Kebangkitan India: Dari Model Pembangunan Nehru ke Model Knowledge Based Society*, 2014). Menurut analisis JP Morgan, dengan penduduk yang mayoritas berusia muda dan berpendidikan tinggi, dalam 20-30 tahun mendatang India akan diunggulkan dalam pelayanan teknologi informasi atau berbasis pengetahuan dengan layanan jarak jauh.

Mendukung perkembangan teknologi informasi India, revisi kebijakan industri pada tahun 1980 India difokuskan pada meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri, *technological upgrading* dan modernisasi (Padmanabhan., *An Overview of Industrial Policy In India.* , 1933). Kebijakan ini memiliki tujuan dasar meningkatkan daya saing ekspor melalui penanaman modal asing di bidang teknologi tinggi. Menindaklanjuti ekonomi liberalisasi yang tengah diterapkan oleh India, hal ini menciptakan spesialisasi secara tidak langsung terhadap fokus industri di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebagai contoh upaya India

dalam mengembangkan industri teknologi informasi dan telekomunikasinya adalah dengan percobaan meluncurkan satelit.

Chandrayaan-2, pesawat ruang angkasa rancangan India yang membawa kendaraan *lander* Vikram, telah mengorbit di bulan dan mulai turun ke permukaan bulan pada 7 September 2019 pukul 03.07 WIB (Kontan.co.id, 2019). Namun, para ilmuwan *Indian Space Research Organisation* (ISRO) kehilangan kontak selama tahap kedua pendaratan di bulan sehingga India belum bisa menjadi negara ke empat setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia yang lebih dulu telah meluncurkan satelitnya.

Selain percobaan meluncurkan satelit, India pun turut mengembangkan perusahaan informasi dan telekomunikasi yang saat ini cukup terkenal yaitu, Bharat Sanchar Nigam Limited dan Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL). Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) adalah perusahaan telekomunikasi milik pemerintah yang berkantor pusat di New Delhi, India (Enterprises, 2012). Perusahaan ini adalah penyedia telepon tetap terbesar dan penyedia telepon seluler terbesar keempat di India, dan juga penyedia jasa jalurlebar atau dikenal sebagai istilah dalam internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi.

Sedangkan MTNL adalah perusahaan telekomunikasi milik negara di kota-kota metropolitan yang didirikan pada tahun 1986 (Company, 2013). *Transparency makes us different* (*Transparansi membuat kita berbeda*) - adalah motto perusahaan ini. Perusahaan MTNL memonopoli pasar telekomunikasi hingga tahun 1992 ketika sektor telekomunikasi dibuka pada investor asing. Pada tahun 2006, India mendapat investasi dari salah satu investor asal Kuwait, Zain

Telecomu. Zain Telecomu menjual 46% sahamnya kepada aliansi Malaysia-India yang terdiri dari al-Bukhari Group Malaysia dan Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) India, Mahanagar Telephone Nigam Ltd (BSNL) dan Vavasi Group (CNNIndonesia, 2009).

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penulis, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“DAMPAK PEREKONOMIAN CHINA TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI TEKNOLOGI INFORMASI DI INDIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana strategi perluasan pangsa pasar China dalam memegang kendali perekonomian di India?
2. Sejauh mana kontribusi pembangunan industri teknologi informasi India dalam mengimbangi pembangunan inklusif China?
3. Bagaimana kebijakan India dalam menciptakan daya saing industri teknologi informasi guna menghadapi pembangunan inklusif China?

1.3 Pembatasan Masalah

Industrialisasi memiliki potensi dalam membangun perekonomian di India khususnya saat ini di bidang teknologi informasi. Pada penelitian kali ini penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan lebih terfokus. Penulis berfokus pada penelitian daya saing yang akan diciptakan oleh India melalui industri teknologi informasi dalam mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka penulis mencoba mengangkat rumusan masalah, **“Bagaimana arah dan tindakan pembangunan industri teknologi informasi India dalam mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China”**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi perluasan pangsa pasar China dalam memegang kendali perekonomian di India.
2. Untuk memahami sejauh mana kontribusi pembangunan industri teknologi informasi India dalam mengimbangi pembangunan inklusif China.
3. Untuk mengetahui kebijakan India dalam menciptakan daya saing industri teknologi informasi guna menghadapi pembangunan inklusif China.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman penulis dalam menganalisis suatu isu dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan, khususnya pada tema yang diangkat penulis tentang dampak dari pembangunan ekonomi inklusif China terhadap keinginan India untuk melakukan pembangunan industri teknologi informasi dalam mengimbangi strategi China.

2. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai Studi Ilmu Hubungan Internasional di masa yang akan datang apabila akan meneliti tentang perkembangan dari perekonomian China serta pembangunan industri teknologi informasi di India.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dan masyarakat luas pada umumnya mengenai dampak perekonomian China yang begitu luas khususnya pada pembahasan yang penulis analisis pada bab 4, yakni korelasinya terhadap pembangunan industri teknologi informasi di India.
5. Sebagai bahan kajian bagi India dalam menciptakan daya saing teknologi informasi dalam mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif yang dilakukan oleh China.